

**EDISI
REVISI
KE-01**



RENCANA STRATEGIS

BP PAUD DAN DIKMAS PROVINSI NTT

2020 - 2024

**BP PAUD DAN DIKMAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**



RENCANA STRATEGIS

EDISI REVISI

BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020 - 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

DITJEN PAUD, DIKDAS DAN DIKMEN
BP PAUD DIKMAS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024.

Dalam penyusunan Renstra ini juga mempertimbangkan tugas BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan pemetaan mutu pendidikan, pengembangan program, supervisi, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumber daya serta pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Renstra BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dasar dan pedoman bagi pejabat di lingkungan BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sebagai acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja) Tahunan; (2) Program dan kegiatan pembangunan lintas sektoral bidang PAUD dan Dikmas secara terukur dan terarah; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup BP PAUD dan Dikmas di wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu, Renstra ini merupakan acuan dalam upaya pencapaian target dan sasaran pembinaan layanan pendidikan anak usia dini dan pelatihan, pembinaan layanan pendidikan masyarakat, dan pembinaan lainnya agar program-program tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai mekanisme yang ada. Akhirnya semoga rencana strategis ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Kupang, Juli 2021

Kepala


Maria B Advensia, SH, M.Hum
NIP. 196712201999032006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum Program PAUD dan Dikmas	3
B. Potensi dan Permasalahan Program PAUD dan Dikmas.....	9
C. Tantangan di Bidang PAUD dan Dikmas	13
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	16
A. Visi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT	16
B. Misi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT	17
C. Tata Nilai BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT	18
D. Tujuan Strategis BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT	21
E. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	24
F. Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	25
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKAT REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BP	26
A. Arah Kebijakan dan Strategi	26
B. Arah Kebijakan dan Strategi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT	28
C. Kerangka Regulasi.....	31
D. Kerangka Kelembagaan	32
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	38
A. Target Kinerja	38
B. Kerangka Pendanaan	40
BAB V PENUTUP	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 RPJM ke IV tahun 2020-2024..... 1
Gambar 2 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 5
Gambar 3 Struktur Organisasi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT 11

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Putus Sekolah	6
Tabel 2 Kualifikasi Pendidikan ASN BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT	10
Tabel 3 Sarana dan Prasarana	11
Tabel 4 Keterkaitan Antara SK dan IKS terhadap Tujuan Lembaga	24
Tabel 5 Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan KRO/RO	25
Tabel 6 Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen.....	27
Tabel 7 6 (enam) Area Perubahan.....	36
Tabel 8 Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja	39
Tabel 9 Program/Kegiatan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja.....	40
Tabel 10 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis	41
Tabel 11 Identifikasi Kebutuhan Pendanaan	41

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran Pembangunan Jangka Menengah Nasional Negara Republik Indonesia (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Gambar 1.
RPJMN ke IV tahun 2020 - 2024



Keempat pilar diatas diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemendikbud RI mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Program dan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut BP-PAUD dan Dikmas Prov. NTT menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 2) Pemetaan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 3) Pelaksanaan Supervisi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 4) Pelaksanaan Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 5) Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 6) Pengelolaan system informasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 7) Pelaksanaan kemitraan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- 8) Pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.

Berbagai kebijakan dan program PAUD-Dikmas disusun untuk memberikan pelayanan Pendidikan yang terbaik untuk masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan program PAUD dan Dikmas sangat erat terkait dengan partisipasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di sektor pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sinergitas antara pemerintah baik pusat maupun daerah seperti lembaga/organisasi pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, Satuan Pendidikan serta dengan seluruh pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan program yang telah disusun karena merupakan hal yang terdepan.

Untuk memberikan arah pelaksanaan program pendidikan, perlu disusun Rencana Strategis Pendidikan BP PAUD dan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 guna memberikan arah kebijakan dan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Daerah Nusa Tenggara Timur. Renstra ini menguraikan kondisi saat ini dan analisis situasi, tantangan, peluang dan hambatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan, serta anggaran yang diperlukan BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2020-2024.

A. Kondisi Umum Program PAUD dan Dikmas

Wilayah kerja BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan mencakup 21 (dua puluh satu) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kota Kupang. Kondisi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Program Pendidikan Masyarakat lainnya secara umum dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan dan pelayanan kepada anak usia 0-6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia 0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki sekolah dasar dan kehidupan tahap berikutnya.

Berdasarkan data dapodik PAUD dan Dikmas Tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki lembaga PAUD dan Dikmas sebanyak 5.073 satuan PAUD, yang terdiri dari 1551 satuan TK, 3167 satuan KB, 22 Satuan TPA dan 333 satuan SPS.

Dengan jumlah lembaga PAUD yang cukup banyak tersebut, maka secara otomatis Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah tenaga Pendidik atau guru dan Tenaga Pengelola PAUD yang banyak pula. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan pada satuan PAUD. Terlebih pada PAUD nonformal yang secara umum masih didukung dengan tenaga kependidikan yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.

Sebaran lembaga PAUD yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini belum merata. Berdasarkan data Dapodik 2019, hanya 2295 desa yang sudah memiliki satuan PAUD dari 3294 desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

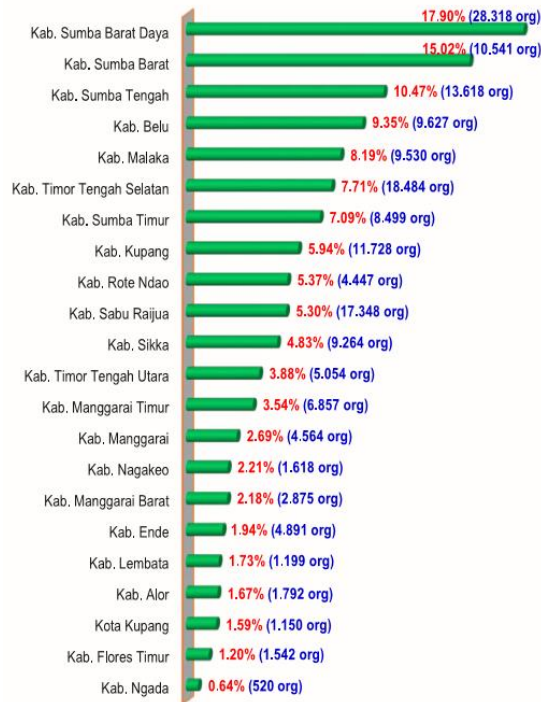
b. Pendidikan Keaksaraan

Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan yang diberikan kepada masyarakat yang belum pernah memperoleh pendidikan atau *drop out* dari sekolah dasar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dasar, kemampuan baca tulis fungsional yang diintegrasikan dengan mata pencarian, dalam arti agar sedapat mungkin diusahakan belajar pendidikan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung dilaksanakan secara terpadu dengan pendidikan mata pencarian dan diikuti dengan kegiatan berusaha.

Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019 bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas dan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Pemetaan data buta aksara dewasa atau penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis dengan huruf latin(buta aksara latin) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019 sebagai berikut:

Gambar 2.

Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke atas



Sumber : Hasil Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh BPS bekerjasama dengan Kemendikbud 2019

Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur angka persentase buta aksara usia 15-59 tahun sebesar 5,24% (173.466 orang), dimana angka ini berada di atas rata-rata nasional 1,93% (3.290.490 orang). Hal ini berarti jumlah persentase buta aksara di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Dilihat dari sebaran di masing-masing wilayah, mayoritas wilayah masih memiliki angka persentase buta aksara yang cukup tinggi, dimana buta aksara tertinggi berada di wilayah Kab. Sumba Barat Daya 17,90% (28.318 orang), diikuti Kab. Sumba Barat 15,02% (10.541 orang), kemudian secara berturut-turut Kab. Sumba Tengah 10,47% (13.618 orang), Kab. Belu 9,35% (9.627 orang), Kab. Malaka 8,19% (9.530 orang), Kab. Timor Tengah Selatan (7,71% (18.484 orang) dan persentase terendah adalah Kab. Ngada 0,64% (520 orang).

Masih tingginya angka/prosentase jumlah penduduk buta aksara ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menguranginya. Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan fungsional melalui kelompok belajar pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),

SKB/SPNF, maupun satuan pendidikan lainnya merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas angka buta aksara.

c. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Biasa dikenal dengan nama Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP, dan Paket C untuk setara SMA. Sebagian besar program pendidikan kesetaraan di Provinsi Nusa Tenggara Timur diselenggarakan oleh PKBM, SKB/SPNF, LSM, perorangan, yayasan, maupun *stakeholder* terkait lainnya. Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2018, presentase penduduk Nusa Tenggara Timur usia 7 – 24 tahun yang putus sekolah dan tidak bersekolah lagi yang menjadi sasaran program kesetaraan baik Paket A, B maupun C sebanyak 23,14%

Tabel 1.
Persentase Penduduk usia 7-24 Tahun yang Putus sekolah dan Tidak Bersekolah Lagi menurut Kabupaten /Kota

NO	Kabupaten/Kota	Persentase Tidak Bersekolah
1	Sumba Barat	20,43
2	Sumba Timur	27,73
3	Kupang	23,34
4	Timor Tengah Selatan	25,00
5	Timor Tengah Utara	22,22
6	Belu	24,80
7	Alor	26,12
8	Lembata	22,92
9	Flores Timur	21,92
10	Sikka	27,16
11	Ende	27,85
12	Ngada	23,57
13	Manggarai	22,77
14	Rote Ndao	20,57
15	Manggarai Barat	23,44
16	Sumba Tengah	21,99
17	Sumba Barat Daya	19,56
18	Nagakeo	18,56
19	Manggarai Timur	20,92
20	Sabu Raijua	19,24
21	Malaka	21,09
22	Kota Kupang	21,26
	Nusa Tenggara Timur	23,14

Sumber data: BPS Prov. NTT Tahun 2019

d. Pengembangan Budaya Baca

Budaya baca adalah suatu sikap dan tindakan atau perbuatan seseorang untuk membaca yang dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Pengertian budaya baca ini mencakup kebiasaan dan proses didalam waktu yang lama didalam kehidupan seseorang untuk selalu menggunakan sebagian waktu untuk membaca. Data Taman Bacaan Masyarakat Di Wilayah kerja BP-PAUD dan DIKMAS Nusa Tenggara Timur keadaan Tahun 2019 sebanyak 215 lembaga yang diselenggarakan oleh PKBM, SKB/SPNF dan Yayasan maupun Ormas dan LSM.

Keberadaan Lembaga TBM di tengah-tengah masyarakat secara langsung dapat meningkatkan kemampuan membaca maupun literasi bagi masyarakat. BP PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur perlu berperan aktif dalam optimalisasi penyelenggaraan TBM agar mereka mampu berperan aktif dalam membangun masyarakat menuju era digital yang semakin maju. Sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD maupun mandiri/swadaya pengelola.

e. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan kepercayaan diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya.

Pendidikan Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan usia 15 tahun keatas, melalui upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik agar perempuan dapat berperan aktif dalam proses pembangunan keluarga, masyarakat dan bangsa. Sasaran pendidikan pemberdayaan perempuan adalah perempuan kurang mampu secara ekonomi 15 tahun ke atas termasuk lanjut usia, perempuan rawan trafficking dan perempuan yang sedang dan atau selesai mengikuti program keaksaraan.

f. Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penyusunan rencana aksi pengembangan sumber daya PAUD dan DIKMAS meliputi unsur-unsur ketenagaan sebagai berikut:

1) Pendidik PAUD dan Dikmas

- (a) Widyaprada/Pamong Belajar, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model/program dan pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program PAUD dan DIKMAS;
- (b) Pendidik PAUD, yaitu tenaga honor yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi anak usia dini.
- (c) Tutor, yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C), serta pendidikan keaksaraan fungsional.

2) Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas

Tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan PAUD dan Dikmas. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan PAUD dan Dikmas.

Tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas di Daerah Nusa Tenggara Timur meliputi:

- a) Widyaprada yaitu PNS yang diberi tugas dan tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model
- b) Penilik/Pengawas PAUD, yaitu PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilikan PAUD yang sering juga disebut Penilik PAUD;
- c) Kepala SKB/SPNF, yaitu PNS yang menjabat sebagai tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak tambahan secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin SKB/SPNF;

- d) Pengelola atau Tenaga administrasi pada kelompok belajar pada satuan PAUD dan Dikmas, yaitu orang yang mendirikan, mengelola, mengadministrasikan kegiatan guna menunjang penyelenggaraan kelompok belajar tersebut;
- e) Pengelola atau tenaga administrasi pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), yaitu orang yang mendirikan, mengelola dan mengadministrasi kegiatan guna menunjang penyelenggaraan PKBM;
- f) Pengelola atau tenaga administrasi pada Taman Bacaan Masyarakat (TBM), yaitu orang yang mendirikan, mengelola dan mengadministrasi kegiatan guna menunjang penyelenggaraan TBM.

B. Potensi dan Permasalahan Program PAUD dan Dikmas

BP PAUD dan Dikmas Prov. Nusa Tenggara Timur merupakan UPT yang baru saja bergabung dengan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas sejak 1 Januari 2017. Sebagai lembaga baru tentunya BP PAUD dan Dikmas Prov. Nusa Tenggara Timur memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Namun sejalan dengan tuntutan masyarakat akan mutu pengembangan program PAUD dan Dikmas serta peningkatan sumber daya manusia yang semakin tinggi, BP PAUD dan Dikmas Prov. Nusa Tenggara Timur berusaha untuk tetap menjaga kualitas penyelenggaraan program pengembangan PAUD dan Dikmas dengan sebaik-baiknya.

1. Potensi BP PAUD dan Dikmas

BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT dalam membuat Renstra juga melihat kekuatan dan kelemahan yang ada untuk menjalankan program sesuai dengan acuan yang telah direncanakan, yaitu dengan melihat:

a. Potensi Historis

Sebelum menjadi UPT Pusat Direktorat Jenderal PAUD Dikdas dan Dikmen merupakan UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang bertugas melaksanakan pengembangan, dan pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal serta pendidikan khusus di Daerah Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya sehubungan dengan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 maka BPKB dialihfungsikan menjadi UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas melakukan peningkatan mutu program PAUD dan

Dikmas sesuai dengan Permendikbud Nomor : 05 Tahun 2017. Sesuai dengan peraturan yang terbaru ini, BP PAUD dan Dikmas sebenarnya memiliki kesamaan tugas pokok dan fungsi dengan lembaga sebelumnya. Dengan kesamaan ini diharapkan menjadi kekuatan bagi stakeholder terkait guna melaksanakan tugas-tugas sebagai BP PAUD dan Dikmas Prov. Nusa Tenggara Timur.

b. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT didukung Sumber daya manusia sebanyak 45 orang pegawai, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 22 orang dan pegawai perempuan sebanyak 23 orang, yang terdiri dari kelompok jabatan fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional tertentu. Jika dilihat dari kualifikasi pendidikannya, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Kualifikasi Pendidikan ASN BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Program Doktor (S3)	-	
2	Pascasarjana (S2)	5 orang	
3	Sarjana (S1)	26 orang	
4	Diploma (D1-D3)	5 orang	
5	SLTA sederajat	9 orang	
6	SLTP sederajat	- orang	
	Total	45 orang	

Selanjutnya dari 45 Jumlah pegawai tersebut, jika dilihat dari pangkat dan golongannya adalah 15 orang golongan IV, 21 orang golongan III, dan 9 orang golongan II.

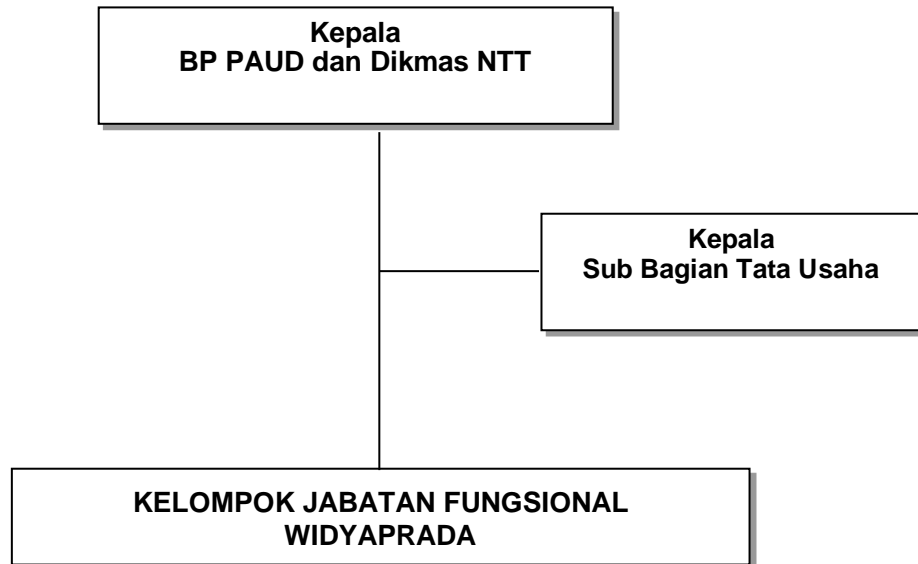
Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dalam melaksanakan tugasnya, didukung oleh tenaga fungsional yaitu Widyaprada.

c. Struktur Organisasi

Secara kelembagaan BP-PAUD dan Dikmas Nusa Tenggara Timur memiliki Struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 3.

Struktur Organisasi BP PAUD Dan Dikmas Prov. NTT



d. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki oleh BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Sarana dan Prasarana

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
	Gedung Perkantoran	1 Unit	
2	Gedung Pertemuan	3 unit	
3	Gedung Perpustakaan	1 Unit	
4	Asrama	5 Unit	
5	Ruang Makan	1 Unit	
6	Tempat Ibadah/Mushola	1 Unit	
7	Guest House	4 Unit	
8	Lab Komputer	1 Unit	
9	Perpustakaan	1 Unit	
10	Lab Bahasa	1 Unit	

11	Ruang Kursus Menjahit	1 Unit	
12	Ruang Bengkel, Paket B, Sablon dan Koperasi	1 Unit	
13	Garasi	1 Unit	
14	Pos Jaga	1 Unit	
15	Lapangan Tenis	1 Unit	

2. Permasalahan di Bidang PAUD dan Dikmas

Kegiatan pembinaan program PAUD dan Dikmas Prov. NTT tidak lepas dari permasalahan dan kendala. Berdasarkan hasil pengamatan dan evaluasi diri yang dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT maka dapat diuraikan permasalahan sebagai berikut:

- a. Untuk layanan pendidikan anak usia dini
 - Masih banyak lembaga/satuan PAUD yang belum terakreditasi.
 - Masih banyak lembaga PAUD yang belum dikelola secara professional sehingga dalam memberikan layanan pendidikan kurang maksimal bagi masyarakat.
 - Masih ada desa yang belum memiliki satuan PAUD
- b. Untuk layanan pendidikan masyarakat
 - Masih ada penduduk yang belum memiliki pendidikan setara SD, SMP dan SMA;
 - Masih ada Kabupaten/Kota yang belum menerapkan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pendidikan keorangtuaan (parenting education).
 - Masih banyak peserta didik pendidikan keaksaraan dasar dan lansia yang belum memperoleh layanan kecakapan hidup sesuai minat dan kemampuannya.
- c. Untuk layanan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Masih banyak guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas yang belum mengikuti diklat teknis.
 - Masih banyak guru dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas yang belum mengikuti pengembangan professional berkelanjutan.
- d. Untuk Layanan Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan

- Masih banyak satuan yang belum mempunyai data pokok pendidikan
Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Penjaminan Mutu PAUD dan Dikmas
2. Penguatan tata kelola, transparan, akuntabilitas serta sistem pengendalian manajemen, dalam rangka penjaminan mutu dan efisiensi program BP PAUD dan Dikmas;
3. Peningkatan layanan pengembangan program dan pengendalian mutu di BP PAUD dan Dikmas;
4. Peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan perluasan akses layanan PTK- PAUD dan Dikmas;
5. Peningkatan kualifikasi GTK-PAUD dan Dikmas dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi menurut jenisnya;
6. Peningkatan wawasan GTK-PAUD melalui kebijakan wawasan GTK-PAUD dan Dikmas melalui pengembangan profesi, workshop, lokakarya, dll;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas di satuan PAUD;
8. Melakukan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana di bidang PAUD dan Dikmas.

C. Tantangan di Bidang PAUD dan Dikmas

Dari berbagai potensi dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, tantangan yang dihadapi dalam memajukan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat berkenaan dengan ekosistem Pendidikan, guru, pedagogik dan kurikulum/program adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan layanan pendidikan bagi anak usia 3-6 tahun sesuai standar nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT
3. Pembangunan ZI-WBK

4. Kurangnya partisipasi masyarakat putus sekolah untuk mengenyam Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
5. Masih sedikit satuan PAUD dan Dikmas yang terakreditasi
6. Pemahaman dan pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan oleh satuan Pendidikan belum merata
7. Menjadikan pembelajaran daring/virtual sebagai alternatif dalam proses belajar mengajar.

Adapun Alternatif pemecahan masalah antara lain :

1. Meningkatkan capaian sasaran program dan mutu PAUD dan Dikmas melalui inovasi dalam pengembangan program, kemitraan, dan peningkatan kapasitas SDM lembaga.
2. Memperkuat komunikasi internal agar tercipta koordinasi dalam rangka pelaksanaan program dan sinergi sumber daya sehingga program /kegiatan semakin efektif dan efisien.
3. Adanya implementasi manajemen resiko dan peluang di setiap Seksi dan Sub bagian Umum, serta kelompok kerja Pamong Belajar untuk memperkuat lembaga dalam menghasilkan program dan layanan mutu.
4. Memperkuat manajemen berbasis kinerja
5. Memberikan bantuan secara moril dan motivasi bagi pegawai/staf untuk mengikuti pendidikan yang belum pendidikan S1 dan S2.
6. Adanya peningkatan kompetensi bagi staf dan pamong belajar melalui :
 - Pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam menunjang tugas dan pokok lembaga BP-PAUD dan Dikmas Prov. NTT
 - Magang bagi staf dan pamong belajar untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokoknya. Pelaksanaan magang dilaksanakan didalam dan diluar negeri.
 - Penambahan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas staf dan pamong belajar seperti adanya AC, laptop, ruangan yang nyaman, dan sebagainya.
7. Memperkuat sarana dan prasarana labsite dan menambah lokasi labsite yang digunakan sebagai tempat ujicoba bagi pengembangan program.

8. Menjalinkan kerjasama dengan mitra kerja seperti Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/kota, organisasi dibidang pendidikan PAUD dan pendidikan masyarakat (Himpaudi, IGTK, IGRA dan lembaga mitra lainnya).

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 26 Tahun 2020 pasal 2 ayat (1) bahwa Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Memperhatikan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab satu, Pasal satu, Butir dua, bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Menindaklanjuti kebijakan Presiden Republik Indonesia yang dikemas dalam RPJMN 2020-2024 oleh BAPENAS tentang Indonesia berpenghasilan menengah – tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Memperhatikan Rancangan Teknokratik Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024.

Berpijak dari uraian tersebut di atas Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Prov. Nusa Tenggara Timur merumuskan Visi sebagai berikut “

**“TERWUJUDNYA PAUD DAN DIKMAS YANG BERMUTU,
BERKARAKTER, DINAMIS, MELALUI PELIBATAN PUBLIK DAN
GOTONG ROYONG”**

Maka makna yang terkandung dalam visi Balai diantaranya: bermutu yang dimaksud adalah berkualitas, bertaraf tinggi artinya Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat dapat dipercaya dan diperlukan oleh pemangku kepentingan dengan taraf atau derajat yang tinggi. Sedangkan berkarakter adalah watak atau sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat baik yang dimiliki oleh insan PAUD dan Dikmas baik sebagai pelayan maupun sebagai pihak yang dilayani. Adapun Dinamis yang dimaksud adalah penuh semangat,

tenaga yang energik sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.

BP PAUD dan Dikmas NTT dalam melaksanakan kegiatan dan memberikan pelayanannya tidaklah sendirian akan tetapi dibangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan semua pihak terkait khususnya pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, komunitas dan pribadi masyarakat dilibatkan dalam hal kegiatan kreatif dan dilakukan bersama-sama secara efektif dan efisien.

B. Misi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua arahan presiden (RPJMN) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan Anak usia dini yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Untuk mewujudkan visi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT yang sejalan dengan Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045, maka ditetapkan misi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT:

1. Mengembangkan program PAUD dan Dikmas yang berkualitas dan bermanfaat.
2. Memetakan mutu satuan PAUD dan Dikmas yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
3. Melaksanakan supervisi untuk percepatan standarisasi satuan PAUD dan Dikmas.

4. Mengembangkan sumber daya PAUD dan Dikmas yang berkarakter dan berkomitmen tinggi.
5. Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program PAUD dan Dikmas yang efektif dan efisien.
6. Melakukan kemitraan di bidang PAUD dan Dikmas yang saling menguntungkan.
7. Mengelola sistem informasi PAUD dan Dikmas yang aktual, cepat, tepat dan bermanfaat.
8. Memberikan layanan PAUD dan Dikmas sesuai kebutuhan masyarakat.

C. Tata Nilai BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT 2020-2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan.
- b. Jujur dalam segala tindakan.
- c. Menghindari benturan kepentingan.
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan.
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi.

- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun diluar ketentuan.

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan.
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif.
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien.
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai.
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan.
- h. Tidak monoton.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja.
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik.
- e. Suka mempelajari hal yang baru.
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

4. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja.
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik.
- e. Suka mempelajari hal yang baru.
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

5. Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara professional.
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai.
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja.
- d. Tidak sewenang-wenang.
- e. Tidak mementingkan diri sendiri.
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya.
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

6. Terlibat Aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama

serta memberikan dorongan, agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian.
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja.
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis).
- d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah.

7. Tanpa Pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya.
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun).
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa.
- e. Berburuk sangka kepada rekan kerja.

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegawai BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 didukung oleh kinerja BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT yang prima.

D. Tujuan Strategis BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT

Dalam upaya merealisasikan visi dan misi BP PAUD dan Dikmas NTT dirumuskan tujuan strategis Tahun 2020-2024 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu pembelajaran PAUD terutama pada perkembangan peserta didik

Peningkatan mutu pembelajaran PAUD didasarkan pada 8 SNP (berdasarkan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan), terdiri dari:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi
- c. Standar Proses
- d. Standar Penilaian Pendidikan
- e. Standar Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana
- g. Standar Pengelolaan
- h. Standar Pembiayaan

Delapan standar tersebut diimplementasikan dalam pemetaan mutu pendidikan. Pemetaan mutu satuan ini melalui beberapa tahapan, antara lain: penyusunan peta mutu, pengolahan dan analisis data mutu, penyusunan rekomendasi peningkatan mutu, diseminasi hasil pemetaan mutu dan sosialisasi penjaminan mutu.

Kegiatan pemetaan mutu pendidikan harus dilakukan sebelum kegiatan supervisi mutu pendidikan. Supervisi mutu pendidikan merupakan kegiatan pendampingan lembaga yang akan diakreditasi berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan dengan standar SNP. Supervise mutu satuan pendidikan melalui beberapa tahapan, antara lain: penyusunan bahan supervise, bimbingan teknis supervisi, pelaksanaan supervisi, analisis, diseminasi dan evaluasi hasil supervisi mutu pendidikan.

Fasilitasi mutu pendidikan berdasarkan SNP dilaksanakan dalam bentuk pemberian advokasi dan pendampingan mutu berdasarkan SNP terhadap satuan pendidikan di daerah. Substansi fasilitasi mutu pendidikan, berupa:

1. Implementasi program prioritas nasional Kemendikbud yang mendukung Kebijakan “Merdeka Belajar” dan “Pelajar Pancasila”, meliputi: Program

Sekolah Penggerak, Asesmen Nasional, Mitigasi Resiko Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di era Pandemi COVID-19, Edukasi PHBS di Era Pandemi COVID-19, Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan penguatan teknologi informasi berbasis karakteristik daerah

2. Pengembangan sumber daya PAUD dan Dikmas, melalui: pelatihan, bimbingan teknis, workshop, coaching clinic, seminar/webinar dalam rangka peningkatan mutu PAUD dan Dikmas
3. Penyelenggaraan Tutor Bantu SPNF SKB di daerah
4. Pengembangan sistem informasi dan kemitraan peningkatan mutu PAUD dan Dikmas yang berbasis potensi lokal dan karakteristik daerah

Untuk mendukung aktivitas penguatan mutu PAUD dan Dikmas, diperlukan manajemen pengelolaan data pokok PAUD dan Dikmas yang akurat, valid dan tebarukan di satuan PAUD dan Dikmas Kabupaten/Kota, dengan melalui beberapa tahapan antara lain: penyusunan bahan verifikasi, bimbingan teknis verifikasi data mutu, pengumpulan data mutu, dan verval data mutu

2. Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BP PAUD dan Dikmas

Penguatan tata kelola yang dimaksud adalah penerapan prinsip tata kelola negara yang baik. Prinsip – prinsip dasar penyelenggaraan tata kelola negara yang baik meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Penguatan sistem pengendalian manajemen adalah proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh bagian dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Fungsi penguatan sistem pengendalian manajemen adalah:

1. Melakukan perencanaan yang tepat
2. Melakukan koordinasi yang tepat antar bagian
3. Melakukan proses komunikasi informasi yang baik
4. Mengambil sebuah keputusan akan suatu hal
5. Memotivasi pegawai BP PAUD dan Dikmas agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan unit kerja.
6. Melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di unit kerja
7. Menilai kinerja pegawai yang ada di dalam unit kerja
8. Meningkatkan sistem akuntabilitas BP PAUD dan Dikmas

9. Merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku
10. Mengelola segala kegiatan yang terjadi pada BP PAUD dan Dikmas sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan, maka perlu disusun Indikator Kinerja Tujuan (IKT) yang ingin dicapai, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan peningkatan mutu pembelajaran PAUD terutama pada perkembangan peserta didik memiliki indikator kinerja:
 - a. Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang PAUD
 - b. Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang PAUD
2. Tujuan penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BP PAUD dan Dikmas memiliki indikator kinerja:
 - a. Terwujudnya tata kelola BP PAUD dan Dikmas yang berkualitas.
 - b. Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang PAUD

E. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT selaku UPT Pusat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berada di bawah naungan Unit Eselon Utama Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, menetapkan Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang selaras dan diturunkan dari Unit Eselon Utamanya. Adapun Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta keterkaitannya dengan Tujuan BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.

Keterkaitan antara SK dan IKSK terhadap Tujuan Lembaga

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TUJUAN TERKAIT
Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya 2. Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya 3. Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya 4. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki DAPOPAUD akurat, terbarukan dan berkelanjutan 	Peningkatan mutu pembelajaran PAUD terutama pada perkembangan peserta didik

Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat SAKIP Minimal BB 2. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 80 	Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BP PAUD dan Dikmas
---	--	--

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, dan KRO/RO yang tertuang dalam Dokumen RKA-K/L DIPA Petikan, diturunkan dari Unit Eselon Utamanya. Adapun Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, KRO/RO terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 5.

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan KRO/RO Dalam Struktur Penganggaran RKA-K/L DIPA Petikan

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KRO/RO
023.03.DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 6397 Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas 023.03.WA Program Dukungan Manajemen 2005 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	Persentase peningkatan mutu satuan pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas <ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB 2. Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L masing-masing satker minimal 80 3. Persentase DAPO PAUD, Dikdas dan Dikmen akurat terbaru dan berkelanjutan 	QDB. Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (5.690 Lembaga) 850. Satuan PAUD dan Dikmas yang Difasilitasi Penjaminan Mutunya EAA. Layanan Perkantoran (2 Layanan) 01. Gaji dan Tunjangan 02. Operasional dan Pemeliharaan Kantor EAC. Layanan Umum (1 Layanan) 970. Dukungan Manajemen Satker EAD. Layanan Sarana Internal (1 Layanan) 996. Layanan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024, serta hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2020-2024. Renstra menjadi dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Rujukan-rujukan utama ini secara konsisten harus dapat dicermati, dianalisis dan dipertajam ke dalam Renstra PAUD, Dikdas, dan Dikmen agar tidak keliru dan dapat optimal dalam teknis pelaksanaannya sampai kepada pengelola kegiatan, dan juga output-output yang menjadi ujung tombak bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program.

1. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam arah kebijakan dan strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Adapun arah kebijakan dan strategi yang ada di Direktorat Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Agenda	Arah Kebijakan	Strategi
Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita b. Membangun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengadakan lembaga PAUD yang sesuai dengan kebutuhannya, khususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD c. Menyiapkan ketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia guru PAUD d. Mempertimbangkan TK-SD Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas awal SD e. Menyediakan subsidi PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu agar anak-anak tersebut terbantu kesiapan bersekolahnya melalui pemberian Bantuan Operasional f. Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Kebijakan SPM, pendanaan dari filantropi dan subsidi silang swadaya masyarakat (crowdfunding); g. Menyusun kebijakan kelembagaan yang dibutuhkan mengenai satuan PAUD.
	2. Wajib Belajar 9 (sembilan) tahun tuntas dan wajib belajar 12 (duabelas) tahun meningkat	<ul style="list-style-type: none"> a. Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana; b. Mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana; c. Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun d. Melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus
	3. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	<ul style="list-style-type: none"> a. Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana b. Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat c. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan d. Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna e. Proses pembelajaran meningkat mutunya
	4. Penguatan Budaya, Bahasa	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun identitas bangsa Indonesia dan rasa

	dan Pendidikan Karakter pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<p>bangga sebagai bangsa Indonesia</p> <p>b. Memperkenalkan survei keadaan sekolah (school climate survey) untuk mempromosikan budaya positif sekolah</p> <p>c. Mengumpulkan informasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dan kapasitas metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman atas kesentosaan anak (children wellbeing)</p>
	5. Penguatan tata kelola pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	<p>a. Implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI, menguat</p> <p>b. Perencanaan dan penganggaran pendidikan di daerah membaik</p>

B. Arah Kebijakan dan Strategi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT

Arah kebijakan dan strategis BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT mengacu pada arah kebijakan dan strategi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen yang bertolak dari kebijakan merdeka belajar. Adapun arah kebijakan dan strategi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT adalah sebagai berikut:

1. Mutu Layanan PAUD satu tahun Pra-SD Meningkat

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat adalah:

- a. Melakukan advokasi dan pendampingan penyiapan kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD, terkait dengan jenis layanan, mekanisme dan sistem insentif penjaminan mutu layanan, dan kurikulum PAUD untuk pemenuhan capaian SDG
- b. Melakukan koordinasi dan sinergitas program secara intensif dengan Unit Eselon Utama terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan bermutu satu tahun pra-SD di satuan PAUD daerah

Kegiatan yang mendukung dalam rangka peningkatan mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD adalah:

- a. Pendampingan layanan Holistik Integratif di lembaga PAUD
- b. Pemetaan mutu lembaga PAUD dan Dikmas
- c. Supervisi lembaga PAUD dan Dikmas
- d. Fasilitasi lembaga PAUD dan Dikmas berdasarkan SNP

2. Proses Pembelajaran PAUD dan Dikmas Meningkatkan Mutunya

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah melakukan advokasi dan pendampingan terhadap Sekolah Penggerak sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran di sekolah-sekolah lain. Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan proses pembelajaran adalah:

- a. Melakukan advokasi dan pendampingan terhadap satuan PAUD dan SKB yang menjadi Sekolah Penggerak
- b. Melakukan koordinasi dan sinergitas program secara intensif dengan Unit Eselon Utama terkait dengan implementasi kebijakan Program Sekolah Penggerak

3. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- a. Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar
- b. Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan
- c. Memperkuat peran ULT (Unit Layanan Terpadu) dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, mengembangkan Aplikasi Balai Centre melalui android untuk mempermudah fasilitasi layanan PAUD dan Dikmas, memaksimalkan peran media sosial (seperti instagram, twitter, kanal youtube, dsb) dalam sosialisasi program di masyarakat.

Kegiatan yang mendukung dalam rangka Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

- a. Data pokok PAUD dan Dikmas yang akurat, terbaru dan berkelanjutan di Kabupaten/Kota
- b. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi oleh satuan PAUD dan Dikmas

4. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

- a. Pendampingan layanan PAUD dengan kualitas yang baik, termasuk PAUD HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevalensi stunting pada balita
- b. Bermitra dengan pemerintah daerah dalam membangun komitmen untuk terus mengadakan lembaga PAUD di wilayah yang belum memiliki lembaga PAUD

5. Penguatan tata kelola pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah Implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait (termasuk DU/DI) menguat. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

- a. mengembangkan mekanisme dengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri untuk mengelola hal-hal yang berdampak pada anggaran pendidikan, antara lain pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk DAK fisik, dan DAK non-fisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayaran non-tunai (cashless).

Kegiatan yang mendukung dalam rangka memperkuat implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk DU/DI adalah:

- a. Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB
- b. Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
- c. Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL masing-masing Satker minimal 81.

6. Penguatan Jaringan Kemitraan

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penguatan dan perluasan jejaring kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif adalah:

- a. Menggalang kemitraan dengan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/ Kota
- b. Menggalang kemitraan dengan BUMN/ Perusahaan setempat dengan memanfaatkan dana CSR untuk kesejahteraan masyarakat

- c. Menggalang program terpadu melalui kemitraan untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kreatif dengan mengolah potensi lokal

Kegiatan yang mendukung dalam rangka penguatan jaringan kemitraan PAUD dan Dikmas adalah:

- a. Penguatan kemitraan dengan Lembaga Akreditasi Nasional
- b. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan SKPD Kabupaten/Kota
- c. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan memanfaatkan CSR yang berbasis potensi lokal/daerah

C. Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Prov. NTT, regulasi yang digunakan berupa Undang- undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara.
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019.
13. Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
14. Permendikbud Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
15. Permendikbud RI Nomor 26 Tahun 2020 Tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
16. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Kemendikbud RI dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

D. Kerangka Kelembagaan

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT secara optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kemendikbud RI, BP PAUD dan Dikmas memiliki tugas untuk melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

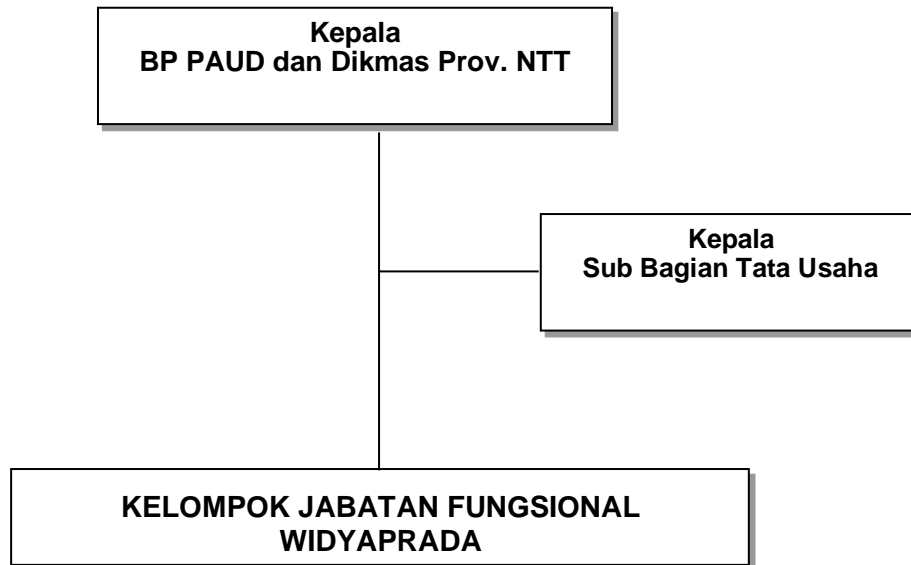
Dalam melaksanakan tugasnya, BP PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:

- a. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- b. Pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- c. Supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- d. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- e. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- f. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- g. Pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- h. Pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.

Menurut pasal 32 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tugas BP PAUD dan Dikmas adalah melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Permendikbud Nomor 26 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis (UPT) kementerian Pendidikan dan kebudayaan diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 302 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Struktur Organisasi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT sebagi berikut:

Gambar 4.
Struktur Organisasi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT (Permendikbud Nomor 26 Tahun
2020)



2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berintegritas, profesional, dan kompeten berdasarkan system merit sesuai bidang tugasnya sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun kedepan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen diharapkan dapat mewujudkan birokrasi berkelas dunia (SMART ASN) sesuai dengan *Roadmap* SDM secara nasional yaitu ASN yang memiliki kompetensi integritas, nasionalisme, berwawasan global, TIK dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

Untuk memastikan ketersediaan SDM tersebut, strategi utama yang dilakukan dalam pengelolaan SDM adalah melalui proses rekrutmen yang transparan untuk mendapatkan *talent* terbaik, peningkatan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi, serta penerapan system penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) dalam rangka meningkatkan kinerja seluruh ASN. Kondisi ketenagaan periode Juli 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Jabatan Kedinasan
 - 1. ASN (45 orang)
 - Pejabat Eselon : 2 orang
 - Jabatan Fungsional Umum : 24 orang
 - Jabatan Fungsional Tertentu : 19 orang
 - 2. Non ASN/PPNPN : 16 orang
- b. Menurut Kualifikasi Pendidikan
 - 1. Strata 2 (S2) : 5 orang
 - 2. Strata 1 (S1) : 26 orang
 - 3. Diploma (DI – III) : 5 orang
 - 4. SMA/Sederajat : 9 orang
- c. Menurut Pangkat/Golongan Ruang
 - 1. Pembina Tk.I IV/b : 13 orang
 - 2. Pembina IV/a : 2 orang
 - 3. Penata Tk.I III/d : 5 orang
 - 4. Penata III/c : 3 orang
 - 5. Penata Muda Tk.I III/b : 4 orang
 - 6. Penata Muda III/a : 10 orang
 - 7. Pengatur Tk.I II/d : 4 orang
 - 8. Pengatur II/c : 3 orang
 - 9. Pengatur Muda Tk.1 II/b : 1 orang
- d. Menurut Jenis Kelamin
 - 1. Laki-laki : 22 orang
 - 2. Perempuan : 23 orang

3. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Selain itu, BP PAUD dan Dikmas Prov. NTT juga

terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi enam area perubahan, yakni:

Tabel 7.
 6 (Enam) Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di BP PAUD dan Dikmas ● Pengembangan budayakerjadancara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0;
2.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembentukan tim SPI di BP PAUD dan Dikmas ● Penyusunan rencana kerja SPI ● Penguatan Sistem Manajemen Konflik
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> ● Perencanaan terintegrasi dan lintas fungsi ● Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
4.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit Sistem 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi ● Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi ● Assessment Pegawai ● Penanam nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik ● Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai ● Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan dokumen standar pelayanan ● Penyusunan alur layanan publik ● Mengembangkan budaya pelayanan prima ● Penguatan kompetensi petugas

			<p>elayanan publik</p> <ul style="list-style-type: none">• Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan
--	--	--	--

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target Kinerja merupakan salah satu pentahapan yang sangat menentukan keberhasilan lembaga dalam mewujudkan tercapainya indikator kinerja sasaran dan misi BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT. BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang keberhasilannya ditentukan oleh ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) atau yang biasa disebut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Rencana Strategis BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT Tahun 2020-2024 memuat 6 (enam) IKK yang akan dicapai melalui 2 (dua) program dan kegiatan pokok, yaitu:

1. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas
2. Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen

A. Target Kinerja

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan.

Tabel 8.
Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja
BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT

SK/IKSK	Rincian	Satuan	Lini Dasar	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK 1	Meningkatnya penjaminan mutu PAUD dan Dikmas							
IKK 1.1	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutu pendidikannya	%	24,18	24,18	100	100	100	100
IKK 1.2	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi mutu pendidikannya	%	24,18	24,18	43,33	71	100	100
IKK 1.3	Persentase lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SNP	%	24,18	24,18	43,33	71	100	100
IKK 1.4	Persentase kab/kota yang memiliki data pokok PAUD akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	90	90	95	96	97	98
SK 2	Meningkatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan BP PAUD dan Dikmas							
IKK 2.1	Predikat SAKIP	Predikat	BB	BB	A	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran	Nilai	90	90	95	96	97	98

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan (SK) tersebut, maka ditetapkan 2 (dua) Program dan Kegiatan pada tahun 2020-2024.

Tabel 9.
 Program/Kegiatan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen	Persentase peningkatan mutu satuan pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas
		Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
		Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi dan Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
		Persentase DAPO PAUD, Dikdas dan Dikmen akurat terbarukan dan berkelanjutan
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya tata kelola lembaga yang berkualitas	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB
		Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L masing-masing satker minimal 80

B. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT dalam Dokumen Renstra tahun 2020 – 2024 Revisi ke- 01 (bulan Juli tahun 2021) dibagi ke dalam dua periode yakni:

1. Periode Tahun pertama dan kedua, yakni tahun 2020 dan 2021
2. Periode tahun 2022-2024, berdasarkan restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2022 di seluruh kementerian/lembaga

Kebutuhan pendanaan periode pertama dan kedua, tahun 2020 dan 2021, sebagaimana tertuang pada table sebagai berikut:

Tabel 10.
 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT
 Tahun 2020 dan 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	REALOKASI (DALAM RIBUAN)	
		2020	2021
023.03.DI 6397	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	12.894.326	5.631.937
023.03.WA 2005	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen		8.107.161
JUMLAH		12.894.326	13.739.098

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2022-2024, mengikuti restrukturisasi program yang dilaksanakan mulai tahun 2022 di seluruh kementerian/lembaga, tertuang pada tabel sebagai berikut.

Tabel 11.
 Identifikasi Kebutuhan Pendanaan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN (DALAM RIBUAN)			JUMLAH
		2022	2023	2024	
023.03.DI 6397	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	6.307.770	7.064.702	7.912.466	21.284.938
023.03.W A 2005	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen	9.080.020	10.169.622	11.389.976	30.639.618
JUMLAH		15.387.789	17.234.324	19.302.442	51.924.555

BAB VI

PENUTUP

Dokumen rencana strategis BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT Tahun 2020-2024 Revisi ke-01 disusun sebagai perwujudan komitmen organisasi dalam menjawab tantangan penyelenggaraan program bidang PAUD dan Dikmas di NTT. Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta situasi dan kondisi BP PAUD dan Dikmas berada.

Penyusunan Rencana Strategis BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT Revisi ke-01 disusun dan dirancang melalui proses pemikiran, kegiatan dan tindakan yang dinamis dalam rangka penentuan sasaran, sarana, pengalokasian dana, daya, ruang, waktu dan organisasi yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan. Dengan tersusunnya dokumen Renstra yang berkualitas dengan berbasis mutu memungkinkan BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara terprogram, terpadu, bertahap dan berkelanjutan dengan mengedepankan akuntabilitas, pencitraan publik, kejujuran, objektivitas, dan kebermaknaan secara efektif, efisien, sistematis, dan sistemik.

Akhirnya, melalui Renstra BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT Revisi ke-01 diharapkan capaian kinerja Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Satuan Pendidikan (Provinsi, Kabupaten/Kota) diwilayah kerja BP PAUD dan Dikmas Provinsi NTT baik secara kualitas maupun kuantitas semakin lebih baik, dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.